

# PERUBAHAN POSISI INDONESIA DALAM PERBURUHAN: STUDI PERBANDINGAN BURUH MIGRAN MASA KOLONIAL DAN MASA REFORMASI

**Yenni Eria Ningsih**

Mahasiswa Magister Pendidikan Sejarah, Universitas Sebelas Maret Surakarta

**Abstrak:** Artikel ini mendeskripsikan perubahan dan keberlanjutan yang berlangsung dalam sejarah aktivitas buruh migran di Indonesia. Sebagai upaya untuk menganalisis bangsa Indonesia dalam perburuhan, peneliti menggunakan kajian literatur dari berbagai sumber tulisan. Hasil analisis tersebut selanjutnya peneliti sintesis dan proyeksikan dalam pembahasan artikel ini. Pada masa kolonial Indonesia berperan sebagai obyek penerima buruh dari luar negeri, dalam hal ini dari Cina, meskipun pada waktu itu pemerintah Belanda juga mengirim buruh Jawa ke Suriname, namun hal itu termasuk dalam misi perbudakan, bukan sebagai buruh migran. Fenomena tersebut kemudian berubah dewasa ini, Indonesia berubah peran menjadi subyek pengirim buruh ke beberapa negara di dunia.

**Kata-kata kunci:** buruh migran, perubahan dan kesinambungan

*Abstract: This article describes continuity and change in history of migrant workers in Indonesia. As an effort to analyze the role of Indonesian in the migrant workers problems, researcher uses literature review from various sources. Then, researcher synthesize and project the results of analysis in the discussion of the article. In the colonial era, Indonesia played as object who got migrant workers from China, eventhough the Netherlands Indie also sent many Javanese to Suriname as slave not migrant workers. Those phenomena changes recently, Indonesia become a subject who sent migrant workers throughout the world.*

**Keywords:** migrant workers, change and continuity.

## PENDAHULUAN

Penyebutan istilah “buruh” belum dapat dipastikan secara pasti kapan pertama kali muncul dalam Sejarah Indonesia. Akan tetapi dapat dipastikan bahwa keberadaan buruh sebagai kelompok sosial dalam sejarah Indonesia modern berhubungan erat dengan perkembangan sektor perkebunan, industri atau manufaktur dan pertambangan seiring dengan meluasnya pengaruh kapitalisme, monetisasi ekonomi, dan modernisasi negara kolonial sejak abad ke-19. Istilah buruh secara perlahan-lahan bergeser menjadi kategori sosial untuk mengidentifikasi para penerima upah yang bekerja pada ruang sosial perkotaan dan sektor industri dan manufaktur semata, seperti buruh kereta api, buruh pelabuhan, buruh tambang, buruh pabrik, tukang becak, dan pekerja atau pembantu rumah tangga. Buruh juga dipahami sebagai sub-sistem dari proses produksi yang dikaitkan dengan kelompok sosial lemah yang selalu

tereksploitasi dan termarginalkan pada satu sisi, namun sisi lain sebagai sebuah kekuatan besar yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan secara politis dalam proses kontestasi kekuasaan (Erman & Saptari. 2013: viii).

Istilah “buruh” menurut KBBI Online termasuk dalam golongan kata benda dan bermakna orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah atau biasa disebut pekerja. Dari terjemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua pekerja yang bekerja kepada orang lain baik individu maupun instansi, yang darinya didapatkan upah, maka orang tersebut disebut buruh. Buruh dalam hal ini bermakna luas. Sebagai salah satu kelompok sosial yang memiliki kesadaran yang kuat atas perbedaan atau persamaan kelas dan identitas, pada satu sisi, buruh memiliki kemampuan yang besar untuk membangun solidaritas di antara mereka agar dapat terus bertahan (Erman & Saptari. 2013: ix).

Pada hakikatnya buruh hidup dalam tangan majikan dan mereka mengikuti kehendak majikannya, jarang ditemui buruh yang memiliki lebih dari satu majikan dan yang ada hanyalah majikan yang mempunyai lebih dari satu buruh. Mengikuti pola materialisme dialektika Marx yang menyebut “*it is not consciousness of men that determine their beings, but, on the contrary their social beings determine our consciousness*” (Wijaya, 2015) atau yang dalam sejarah biasanya disebut pula sebagai materialisme historis, aktivitas manusia dimulai dari kehidupan komunalisme yang hidup dalam dua aktivitas yang bertentangan yakni kehidupan berpindah-berpindah dan kehidupan menetap. Kehidupan komunalisme ini yang kemudian menggiring manusia pada persinggungan dan pertentangan sehingga menciptakan tatanan masyarakat yang bersifat feodal. Feodalisme dalam perkembangannya menimbulkan dua kelas yang dominan yakni kelas feodal (tuan tanah) dan kelas budak (Wijaya, 2015: 88). Perubahan posisi Indonesia dalam perburuhan, sebagai studi perbandingan buruh migran masa kolonial dan masa reformasi, menarik untuk dikaji karena mendeskripsikan peran bangsa Indonesia dalam perburuhan. Bahwa ada perubahan dan kontinuitas yang berlangsung dalam aktivitas buruh migran di Indonesia.

### **PERBURUHAN MASA KOLONIAL: INDONESIA SEBAGAI OBYEK**

Kebutuhan akan tenaga kerja di satu pihak dan permintaan akan tenaga kerja di lain pihak telah menimbulkan suatu jenis bisnis baru, yang lazim disebut dengan “perdagangan kuli”. Usaha ini dilakukan oleh para pedagang kuli Cina. Para pengusaha yang melibatkan diri dengan perdagangan kuli, memiliki rumah-rumah penampungan yang sekaligus juga berfungsi sebagai rumah makan di beberapa pelabuhan di Cina. Pemilik rumah makan kemudian menghubungi para *kheh-tau* atau pemimpin yang merekrut calon kuli di desa-desa yang letaknya jauh di pedalaman Cina. Atau para *Kheh-tau* mencari sendiri calon kuli dan memberikannya ke pemilik rumah penginapan itu untuk kemudian diserahkan kepada pihak pencari kuli (Erman, 1995: 109).

“*Tukang jual orang*” adalah istilah yang begitu akrab dan memiliki konotasi yang kurang baik dalam pendengaran banyak orang pada masa kolonial. Istilah ini mengacu pada jabatan seseorang yang menyibukkan dirinya sebagai agen kuli yang menjadi perantara antara pihak pencari kerja dan penerima kerja/pengusaha. Dalam kenyataannya, agen kuli ini seringkali memujuk dan bahkan memaksa orang untuk menjadi kuli di berbagai tempat kerja. Sebab semakin banyak orang yang dikumpulkannya, semakin besar keuntungan yang diterimanya dari pihak pengusaha. Oleh karena itu, pada masa kolonial proses tawar menawar antara kuli dan pengusaha jarang sekali terjadi sebagaimana terdapat dalam aturan manajemen moderen yang rasional. Akibatnya kuli sebagai penjual tenaga adalah sebagai pihak yang lemah dan amat ditentukan oleh agen kuli dan pengusaha (Erman, 1995: 107).

Pada tahun 1908, H. Colijn yang diutus oleh Gubernur Jenderal di Batavia untuk mengadakan perjalanan dinas ke tambang timah Belitung, menemukan bahwa di dalam sebuah rumah numpang yang didiami oleh 400 orang kuli di distrik Manggar, 250 orang bekerja bersama-sama dengan keluarga mereka. Kenyataan itu tentu erat kaitannya dengan sistem perekrutan kuli Cina untuk industri timah Belitung dan seberapa jauh proses perekrutan kuli Cina sebagaimana lazimnya dilaksanakan untuk daerah-daerah lain, seperti Sumatera Timur dan Bangka (Erman, 1995: 107). Untuk melihat kekhasan perekrutan kuli Cina di Belitung, maka perlu diketahui tempat-tempat dan jalur perekrutan kuli Cina untuk Asia Tenggara pada umumnya dan untuk Hindia-Belanda pada khususnya. Sebagaimana diketahui, kota Penang dan Singapura adalah dua tempat pasar kuli Cina yang berperan tidak hanya mendistribusikan kuli ke daerah-daerah koloni Barat di Asia Tenggara, akan tetapi juga mengirim kuli antara lain seperti ke daerah Macao dan California. Sejak pertengahan abad ke 19 sampai dasawarsa pertama abad ke 20, kedua tempat ini berfungsi sebagai tempat penampung para imigran Cina yang datang dari negerinya untuk mencari lapangan kerja. Di Cina sendiri, khususnya di kawasan bagian selatan terdapat pula beberapa tempat perekrutan, seperti di kota-kota Amoy,

Kanton, Swatow, dan di Hongkong (Erman, 1995: 107).

Perekrutan tersebut terjadi karena terjadi permintaan Peningkatan produksi berarti permintaan akan tenaga kerja pun meningkat. Tenaga kerja langka, sehingga untuk menggalakkan penanaman indigo dan tebu secara paksa maka pemerintah memandang perlu untuk membagi-bagikan tanah sawah kepada seluruh penduduk desa (Breman, 2014:10). Erman (1995: 117) menjelaskan bahwa perbandingan antara jumlah orang Cina yang ingin menjadi imigran dengan yang datang ke Belitung amat besar. Jumlah ini terus berkurang, setelah banyak calon imigran yang gagal dalam pemeriksaan, seperti pemeriksaan di Hongkong, ditolak di kapal (karena tidak memenuhi persyaratan medis) dan yang gagal untuk berlayar (karena kekurangan tempat). Pemeriksaan kesehatan di Hongkong sangat cermat dan teliti.

Kemiskinan merupakan penyebab utama mengapa orang Cina mencari lapangan kerja di negara lain. Akan halnya di daerah koloni Belanda di Hindia-Belanda, kebutuhan akan tenaga kerja yang lebih banyak, ditandai sejak terbukanya Hindia-Belanda untuk penanaman modal asing mulai tahun 1870. Penanaman modal asing di berbagai jenis perkebunan dan pertambangan yang intensif tentu memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang besar pula. Berbeda dengan di Jawa, para pemilik modal atau pihak pengusaha di luar Jawa antara lain seperti di Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, tidak dapat mengharapkan atau mengambil tenaga kerja dari penduduk setempat. Di samping penduduk di daerah-daerah tersebut relatif jarang, mereka juga tidak terbiasa menjadi tenaga kerja upahan. Oleh karena itu, tenaga kerja harus didatangkan dari berbagai tempat seperti dari Cina, India dan Jawa. Perkebunan besar seperti tembakau di Sumatra Timur pada mulanya sangat mengandalkan impor tenaga kerja Cina dan kemudian dari Jawa (Erman, 1995: 107). Pemerintah Belanda pernah mengirim buruh Jawa ke Suriname, namun hal itu termasuk dalam misi perbudakan, bukan sebagai buruh migran, sehingga banyak

kesengsaraan yang disebabkan peristiwa tersebut. Kesengsaraan pekerja dapat dilihat dalam penjabaran Brown (2003: 86) sebagai berikut,

*“On the roads as well as the plantations one does not meet people but only walking skeletons, which drag themselves with great difficulty from one place to another, often dying in the process. The Some of the labourers who work in the plantations are in such a state of exhaustion that they die almost immediately after they have eaten from the food which is delivered to them as an advance payment for the produce to be delivered later”*

Sikap patuh yang dimiliki buruh Indonesia pada masa ini menurut Breman (2014:202) disebabkan karena gagasan direksional kolonial yang menggunakan supremasi warna kulit untuk membedakan ras unggul dalam hal ini kulit putih dengan kecerdasan tinggi yang harus dipatuhi dan ras rendah yang harus mengikuti. Berdasarkan kepedihan yang dialami tersebut, muncullah organisasi-organisasi pergerakan. Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 para pekerja Eropa di Indonesia membentuk berbagai serikat buruh (Setiaji, 2003: 8). Berdirinya serikat buruh dari golongan Belanda pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan kejadian yang berlaku di negaranya sendiri (Sandra, 2007: 4). Pada tahun 1904 Inspeksi Perburuhan dibentuk dan para Inspektur Perburuhan diangkat untuk mengawasi pengerahan tenaga kerja dan kontrak kerja. Pada tahun 1905, Peraturan Pabrik diperkenalkan untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengatur kondisi minimum di bengkel-bengkel kerja dan pabrik. Semenjak awal, dibentuknya Inspeksi Perburuhan mendapat tantangan terutama dari pihak pemerintah kolonial lokal maupun dari para pengusaha. Dari pihak perkebunan intervensi negara dilihat sebagai penghalang atau “perusak hubungan patriarkal yang ada dalam masyarakat” dan hanya memancing ketidakpatuhan dan pembangkangan (Erman, & Saptari, 2013: 11).

Walaupun perdebatan ini lebih menyangkut buruh perkebunan namun wacana ini bisa ditemui kembali dalam diskusi-diskusi terutama yang terdapat dalam laporan-laporan Kantor

Perburuhan. Kantor Perburuhan (*Kantoor van Arbeid*) yang didirikan pada tahun 1921 bertugas melakukan penyelidikan tentang kondisi buruh serta mengajukan rekomendasi ke *Volksraad*. Dibentuknya kantor ini kemungkinan merupakan hasil gabungan beberapa faktor. Pertama, pada tahun 1920 Belanda menjadi anggota *International Labour Organization* (ILO) sehingga tekanan untuk melihat kondisi kerja buruh yang di dalam wilayah koloninya, semakin besar. Kedua, adanya desakan kuat kaum liberal Belanda yang menuntut perlindungan bagi buruh Hindia Belanda. Ketiga, adanya motivasi pemerintah kolonial untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pergolakan buruh atau sektor yang “rawan untuk komunisme”, hal yang secara eksplisit tertera dalam laporan pemerintah tentang pemogokan di Surabaya tahun 1925 (Erman, & Sap-tari, 2013: 12).

#### **PERBURUHAN INDONESIA SAAT INI: INDONESIA SEBAGAI SUBYEK**

Di Indonesia, peranan Pemerintah di bidang politik dan ekonomi besar pengaruhnya terhadap pengaturan tenaga kerja di berbagai sektor. Besarnya peranan tersebut antara lain terlihat pada dinamika hubungan antara arus permintaan dan penawaran tenaga kerja yang tergantung pada proyek-proyek pemerintah (Sjahrir, 1995: 1). Pelaksanaan migrasi tenaga kerja di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pemerintah. Disadari bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tidak dapat diimbangi dengan pemenuhan keperluan dan syarat-syarat pemuasan lainnya akan memudahkan timbulnya persoalan-persoalan sosial ekonomi maupun sosial politik yang sangat serius (Moertopo, 1975: 45). Salah satu persoalan nasional yang sampai saat ini belum terpecahkan adalah masalah pengangguran yang diperkirakan akan tetap mewarnai ketenagakerjaan Indonesia hingga beberapa waktu mendatang. Gambaran riil dapat disaksikan pada tahun 2001 di mana pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,3 persen hanya mampu menciptakan kesempatan kerja bagi hanya 970 ribu orang, sementara angkatan kerja telah meningkat dengan 2,5 persen dari ta-

hun sebelumnya. Jumlah ini merupakan 8,10 persen dari angkatan kerja Indonesia pada tahun 2001, dan persentase pengangguran terbuka ini lebih besar dari persentase pengangguran terbuka pada tahun 2000 yang sebesar 6,08 persen dari total angkatan kerja (Saliman, 2005: 76).

Globalisasi ditandai oleh terbukanya segala bentuk akses kemudahan antar negara, sehingga negara maju dapat mensuplai tenaga kerja dari negara berkembang sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam-nya (SDA). Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang masih memprihatinkan ditandai dengan kondisi kemiskinan, pengangguran dan dunia pendidikan yang belum dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Lapangan kerja yang minim di dalam negeri menyebabkan kesempatan kerja yang kecil dan besarnya angka pengangguran di Indonesia. Jumlah pencari kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang luas menyebabkan minat masyarakat Indonesia yang besar untuk melakukan migrasi dan mencari kerja di luar negeri sebagai buruh (migran) guna memenuhi kebutuhan mereka (Azmy, 2011: 66).

Tanggal 3 Juli 1947 merupakan hari bersejarah bagi lembaga Kementerian Perburuhan dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan nama Kementerian Perburuhan. Migrasi tenaga kerja juga tidak hanya terjadi secara nasional, namun internasional. Ada tiga proses dalam migrasi tenaga kerja Indonesia, yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Tahap pra penempatan terdiri dari tahap perekrutan dan seleksi. Tahap penempatan melibatkan kerjasama antara pihak Kemnakertrans RI selaku regulator dan BNP2TKI selaku penanggung jawab operasional serta KBRI negara tujuan selaku representatif pemerintah Indonesia. Negara favorit tujuan buruh migran Indonesia adalah Cina, Malaysia, Arab, dan Singapura. Negara-negara tersebut dianggap maju, sehingga dipercaya akan mendatangkan kemakmuran bagi mereka. Seperti halnya motivasi buruh migran Cina yang mencari pekerjaan di Indonesia ketika masa kolonial, buruh migran Indonesia pun juga bertekad bekerja keluar negeri karena ingin

memutus mata kemiskinan keluarga. Tahap purna penempatan merupakan proses ketika buruh migran sampai di negara tujuannya. Sampai saat ini, pemerintah belum mampu menjalankan tiga tahap tersebut dengan sempurna, masih ditemui beberapa masalah misalnya dokumen buruh migran yang tidak lengkap, masalah kompetensi buruh migran, dan masalah penganiayaan buruh migran.

Masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar, karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah dipahami dan menyangkut jutaan jiwa. Kondisi kerja yang baik, kualitas *output* yang tinggi, upah yang layak serta kualitas SDM adalah persoalan yang selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja disamping masalah hubungan industrial antara pekerja dengan dunia usaha (Sholeh, 2017:62).

Kegiatan sehari-hari dari pelaksanaan tata tertib kehidupan bernegara dipegang oleh pemerintah. Program-program yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak, termasuk kepentingan buruhnya. Oleh karena itu, dari rakyat termasuk kaum buruh dituntut suatu kewajiban dan tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasinya dengan bekerja keras turut serta melaksanakan pembangunan negara dan bangsa dalam segala bidang untuk menuju kesejahteraan umum (Moertopo, 1975: 3).

Para buruh dalam pemerolehan hak-hak dasarnya tentunya ingin mendapatkan keadilan bahwa jika perusahaan maupun instansi tempatnya bekerja maju dan berkembang maka kesejahteraan buruh juga ikut naik sebaliknya apabila perusahaan diambang kehancuran maka para buruh harus legawa menerimanya. Fenomena ini adalah cerminan dari teori keadilan sebagai *fairness* yang dikembangkan oleh John Rawls. Rawls dalam Wijaya (2015:89) menjelaskan bahwa setiap orang harus mempertimbangkan manfaat dari keputusan yang dibuat dengan pemikiran rasional sehingga sekelompok orang harus memutuskan apa yang menurut mereka adil dan tidak adil bagi kepentingan bersama. Dengan mengikuti

pemikiran Rawls, seyogyanya para buruh melalui serikat buruh melakukan negosiasi dengan para pemilik modal dan atau didampingi oleh negara sebagai penjamin hak-hak setiap warga negara namun perlu dibuat catatan bahwa mereka harus memperhatikan kewajiban-kewajibannya sebagai pekerja

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perubahan dan kontinuitas yang berlangsung dalam perburuhan di Indonesia. Pada masa kolonial Indonesia berperan sebagai obyek penerima buruh dari luar negeri, dalam hal ini dari negara Cina, meskipun pada waktu itu pemerintah Belanda juga mengirim buruh Jawa ke Suriname, namun hal itu termasuk dalam misi perbudakan, bukan sebagai buruh migran. Fenomena tersebut kemudian berubah dewasa ini, Indonesia berubah peran menjadi subyek pengirim buruh ke beberapa negara di dunia, pun Cina yang notabene dulu mengeksport tenaga manusia ke Indonesia. Aspek kontinuitas terdapat dalam badan-badan penyalur buruh migran yang sampai saat ini masih ada. Badan-badan penyalur buruh migran berfungsi sebagai badan penghubung antara buruh dan majikan. Dengan adanya penghubung, maka kualitas buruh dapat dikontrol. Karena sebelum dikirimkan ke majikan, Para buruh tersebut mendapatkan bekal *skill* oleh badan-badan penyalur, seperti *skill* bahasa, memasak, dan kemampuan kebersihan. Pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam kontrol penyaluran buruh migran, agar kasus sejak masa kolonial seperti kekerasan, upah dibawah minimal ketentuan, dan penganiayaan dapat dihindari. Agar humanisme dalam perburuhan dapat terwujud.

## DAFTAR RUJUKAN

- Azmy, A, S. 2011. Negara dan Buruh Migran Perempuan: Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010 (Studi

- Terhadap Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia di Malaysia) *Tesis*. Depok: FISIP UI.
- Breman, J. 2014. *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Brown, C. 2003. *A Short History of Indonesia: The Unlikely Nation?*. Singapura: South Wind Productions.
- Erman, E & Saptari, R. 2013. *Dekolonisasi: Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Erman, E. 1995. *Kesenjangan Buruh Majikan: Pengusaha, Koeli, dan Penguasa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moertopo, A. 1975. *Buruh dan Tani dalam Pembangunan*. Jakarta: Centre For Strategic And International Studies.
- Saliman. 2005. Dampak Krisis Terhadap Ketene-garaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*. Vol (2) No (3), Yogyakarta: UNY.
- Sandra. 2007. *Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia*. Jakarta: Trade Union Rights Centre.
- Setiaji, B. 2003. *Ekonomi Serikat Buruh di Indonesia*. Surakarta: UMS.
- Sholeh, M. 2017. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah: Teori serta beberapa Potretnya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol (4) No (1). Yogyakarta: UNY.
- Sjahrir, K. 1995. *Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Kasus Sektor Konstruksi*. Jakarta: Grafiti.
- Wijaya, D, N. 2015. *Corak Humanisme Dalam Serikat Buruh Jawa Tahun 1926-1942*. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 28, Nomor 2, Agustus.